

APBD 2026 Diproyeksikan di Angka Rp7,35 Triliun



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 10/11/2025

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kukar merampungkan Rapat Paripurna ke-23 Masa Sidang I dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda APBD Kabupaten Kukar TA 2026, Jumat (7/11) malam. Rapat Paripurna berlangsung secara maraton ini dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I, Abdul Rasid, dan Wakil Ketua III, Aini Farida beserta anggota DPRD Kukar secara kuorum¹. Sementara itu perwakilan Pemkab dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin bersama perwakilan perangkat daerah dan unsur Forkopimda.

Rampung Paripurna ke-23 dilanjutkan Paripurna ke-24 dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Pemkab Kukar atas Raperda tentang APBD Kabupaten Kukar TA 2026. Selanjutnya Paripurna ke-25 dengan agenda tanggapan dari Pemkab Kukar. Dalam penyampaian Nota Keuangan oleh Wabup Rendi, diketahui proyeksi APBD Kukar 2026 senilai Rp7,35 triliun. Dalam penjelasannya kepada awak media, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja dengan konsistensi aturan mekanisme yang berlaku.

“Dan ini membuktikan bahwa penyampaian Nota APBD sudah sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan dan tata tertib sehingga *alhamdulillah* kita bersyukur penyampaian Nota Keuangan APBD 2026 berjalan sesuai seharusnya,” ungkap dia. Meskipun, lanjut Yani, ada berbagai pertimbangan yang dilalui dengan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) juga rapat fraksi-fraksi hingga telah dirampungkan pula paripurna lanjutan, yakni tanggapan atau pemandangan fraksi terhadap Nota Keuangan, serta tanggapan pemerintah daerah terhadap tanggapan fraksi-fraksi di DPRD menyikapi Nota Keuangan Pemda APBD 2026.

“Tinggal nanti akan dilakukan pembahasan dan persetujuan APBD. Terkait nilai ternyata pemerintah daerah tetap pada konsistensinya bahwa di KUA PPAS 7,3 triliun ternyata yang disampaikan di Nota Keuangan juga sama, walaupun kemarin sempat terjadi polemik ada bahasa dari kawan-kawan pemuda juga pemerintah itu nilainya diturunkan 6,3. Pasti DPRD akan membahas berapapun yang disampaikan,” ujar Ahmad Yani.

Legislator PDIP itu menyebut nilai besaran proyeksi APBD ini menunjukkan konsistensi Pemkab Kukar dalam pembahasan anggaran. “Konsisten di angka 7,35 triliun, kami sebenarnya ingin disampaikan nilai riil yang faktual dan itu nilainya pasti di bawah itu, tapi *alhamdulillah* dengan konsistensi kita tetap mengacu pada angka 7,35 dan mudahan ke depan Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan tetap menyalurkan hak-hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang nilainya luar biasa, sebenarnya kemarin kita hitung-hitung itu bisa di 9 triliun tapi diperkirakan 7,35 ya itulah angka yang pas,” paparnya.

Ahmad Yani menjelaskan adapun catatan setelah rampung rapat paripurna ini, maka Raperda APBD 2026 akan dibahas dengan tidak terlalu lama, sekira satu hingga dua pekan dan di pekan keempat pasti akan disetujui menjadi Perda. “Karena ini masih mekanisme pembahasan tentu kita akan *cross check* terkait dengan Raperda tersebut terkait angka-angkanya dan program-programnya apakah sesuai dengan RPJMD, ketika itu sesuai maka tentu kita harap agar disetujui,” tegasnya. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, APBD 2026 Diproyeksikan di Angka Rp7,35 Triliun, 10/11/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

3. Dalam Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

ⁱ Mengutip dari KBBI, kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.